



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAISHOL MUSLIM
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 281288

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **725.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 355 m2/180 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 510.000.000
2. Tanah Seluas 128 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **192.000.000**

1. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO/MPV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 113.000.000
3. MOTOR, HONDA F1C02N28L0 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, HONDA H1B02N41L0 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
5. MOTOR, SUZUKI GSX 250 Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 25.500.000
6. MOTOR, HONDA H1B02N42L0 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
7. MOTOR, HONDA NC11C1C/AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **21.230.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.955.295
F. HARTA LAINNYA	Rp.	6.700.000
Sub Total	Rp.	965.885.295
III. HUTANG	Rp.	27.745.080
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	938.140.215

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.